

## Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Syariah

Misbahul Ali<sup>1\*</sup>, Mochamad Aditty Mahendra<sup>2</sup>, Mashudi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2,3</sup> Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan

### INFO ARTIKEL

#### Artikel History:

Diterima 8 Januari 2026

Revisi 21 Januari 2026

Disetujui 2 Februari 2026

Publish 10 Februari 2026

#### Keywords:

Kebijakan Hilirisasi Industri,  
Pertumbuhan Ekonomi,  
Syariah

#### \* Corresponding author

e-mail:

[memesaly78@gmail.com](mailto:memesaly78@gmail.com)  
[220721100040@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100040@student.trunojoyo.ac.id)  
[mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id](mailto:mashudi.fkis@trunojoyo.ac.id)

### ABSTRACT

*Commodities that were previously exported in raw form or raw materials become semi-finished or finished goods. Thus, the value of the country's exports becomes greater. The downstream program provides added value benefits to products, increases economic growth from regional to national levels, creates new products for the international market, and optimizes the use of natural resources as an effort to support economic growth in Indonesia. The results of the discussion of this research are the discussion in maqasid sharia, there are several supporting components, such as Hifzu Addin, Hifzu An-nafs, Al-aql, An-nasl, and Al-mal. evaluation of the impact of downstream policies cannot be separated from moral and ethical elements, especially in Indonesia, where the majority of people are Muslim. By considering the perspective of sharia, which emphasizes the principles of justice, sustainability, and social responsibility, it is important to determine whether the implementation of industrial downstreaming policies is in line with sharia values that include economic justice, environmental preservation, and community development.*

Page: 76 - 93

Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam

**Abstrak:** Komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan demikian, nilai ekspor negara menjadi lebih besar. Program hilirisasi memberikan manfaat nilai tambah pada produk, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat regional hingga nasional, menciptakan produk baru untuk pasar internasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil pembahasan penelitian ini adalah pembahasan dalam maqasid syariah, terdapat beberapa komponen pendukung, seperti Hifzu Addin, Hifzu An-nafs, Al-aql, An-nasl, dan Al-mal. Evaluasi dampak kebijakan hilirisasi tidak dapat dilepaskan dari unsur moral dan etika, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan mempertimbangkan perspektif syariah, yang menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, penting untuk menentukan apakah implementasi kebijakan hilirisasi industri sejalan dengan nilai-nilai syariah yang mencakup keadilan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pengembangan masyarakat.

**Kata kunci:** Kebijakan Hilirisasi Industri, Pertumbuhan Ekonomi, Syariah.

### PENDAHULUAN

Guna memenuhi kebutuhan manusia di setiap negara, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam terus dilakukan. Sementara hukum lingkungan berkonsentrasi pada pelestarian sumber daya alam, hukum sumber daya alam berkonsentrasi pada eksploitasi dan pemanfaatannya. Ada perbedaan yang jelas antara kedua hukum ini. Namun demikian, keduanya selalu terhubung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, untuk melaksanakannya, perlu ada konsep dan perencanaan yang matang. Alasan mengapa

perencanaan diperlukan dalam pembangunan, yaitu seseorang diharapkan dapat memperkirakan apa yang akan terjadi saat merancang program, mengetahui resiko yang mungkin terjadi, dan memiliki kesempatan untuk memilih berbagai kombinasi alternatif. Pernyataan ini juga dapat digunakan sebagai dasar dan evaluasi untuk program pemerintah yang akan datang .

Pemerintah berusaha meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah melalui proses hilirisasi. Memperkuat daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah tujuan dari langkah ini. Kebijakan ini diharapkan dapat menguntungkan perekonomian nasional di tengah perubahan global dan tantangan ekonomi domestik (Hehamony, 2024). Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya alam Indonesia telah dieksploitasi sejak lama. Selama lima tahun terakhir, fokus utamanya adalah adanya hilirisasi. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hilirisasi bertanggung jawab atas 6-7% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hingga tahun 2045, program hilirisasi industri mungkin menjadi langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia(SAKTI Agi, 2022).

Hilirasi adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah dari bahan mentah di hulu proses produksi atau *upstream* menjadi produk setengah jadi atau produk jadi di hilir atau downstream. Dengan kata lain, program hilirisasi di Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dengan mengatur proses produksi dari hulu ke hilir. Melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia telah berubah dari negara pengekspor komoditas mentah menjadi negara pengirim produk turunan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Selain mineral dan batubara, rumput laut memiliki banyak turunan yang dapat dimanfaatkan. Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa turunan rumput laut dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pupuk, pakan, makanan, obat-obatan, biofuel, dan sebagainya(Matupalesa et al., 2019).

Dengan melarang ekspor bijih mentah dan mendorong produksi produk turunan dengan nilai tambah tinggi, pemerintah terus berusaha mengoptimalkan nilai tambah komoditas seperti nikel. Namun, Bank Dunia dan Uni Eropa menyarankan agar kebijakan ini dihapus (Deddy & Adriyanto, 2023). Indonesia memiliki produksi biji nikel tertinggi di dunia, menurut data dari Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Produksi bijih nikel Indonesia hampir mencapai 200 juta ton, atau 193,5 juta ton pada tahun 2023. Sekitar 23,7% cadangan nikel Indonesia berada di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nilai jual komoditas ini dapat meningkat hingga 68 kali lipat dengan hilirisasi.

Potensi pencapaian Indonesia atas dampak kebijakan hilirisasi tersebut menjadi peluang bagi akademisi untuk menganalisisnya dari sudut pandang syariah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkannya. Kebijakan ini dievaluasi berdasarkan prinsip syariah seperti keadilan sosial, larangan eksploitasi, dan tanggung jawab lingkungan. Metode ini diharapkan dapat menemukan cara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bekerja sama dengan nilai-nilai syariah yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam bisnis, perspektif syariah menekankan etika, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, ketika seseorang menilai dampak kebijakan hilirisasi industri, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga konsekuensi sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam kebijakan ekonomi ini perspektif syariah menjadi semakin penting di Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia

## **KAJIAN TEORI**

### **Kebijakan Hilirisasi Di Indonesia**

Hilirisasi industri yang sering disebut sebagai proses *downstreaming*, merupakan langkah strategis dalam mengolah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses ini tidak hanya mencakup pengolahan, tetapi juga pemrosesan, pengemasan, distribusi, dan penjualan produk akhir kepada konsumen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hilirisasi bertujuan untuk mengoptimalkan nilai jual produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks Indonesia, hilirisasi menjadi program andalan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah (Hadinata & Marianti, 2020).

Hilirisasi memberikan dampak signifikan terhadap struktur ekonomi dan dunia kerja. Prof. Dr. Suryanto dari Universitas Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada penjualan bahan mentah, tetapi juga menciptakan barang jadi yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan ekspor. Dengan meningkatnya nilai tambah produk, hilirisasi berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan daya saing negara di

pasar global. Lebih lanjut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan target pertumbuhan 6-7% per tahun (Riana Prasetya Putri & Faradina, 2023).

Proses hilirisasi di Indonesia telah diatur dalam berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Minerba yang mengharuskan pengolahan komoditas mineral sebelum diekspor (Hikam, 2025). Contoh konkret dari hilirisasi adalah larangan ekspor nikel mentah yang diberlakukan sejak 2020, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan lebih lanjut. Hasilnya, nilai ekspor produk besi dan baja Indonesia meningkat drastis dari US\$3,3 miliar pada 2017 menjadi US\$27,8 miliar pada 2022. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Penguasaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor krusial dalam proses ini. Tanpa adanya teknologi yang memadai dan budaya inovasi yang mendukung, hilirisasi dapat terhambat (Juhro & Ridwan, 2021). Oleh karena itu, sinergi antara teknologi modern dan budaya lokal sangat penting untuk mencapai hasil optimal dalam hilirisasi.

Hilirisasi juga memiliki potensi besar dalam menciptakan multiplier effect bagi perekonomian. Dengan meningkatnya produksi barang jadi, sektor industri akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga dapat menarik investasi lebih banyak ke dalam negeri. Selain itu, hilirisasi berkontribusi terhadap peningkatan neraca perdagangan Indonesia dengan menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan (Hadinata & Marianti, 2020).

Secara keseluruhan, hilirisasi industri merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui kebijakan yang tepat dan dukungan teknologi serta SDM yang memadai, proses hilirisasi dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan industri hilir seperti baterai dan kendaraan listrik, Indonesia berpotensi untuk bersaing secara global dan mencapai status negara maju pada tahun 2045. Contoh di Indonesia termasuk batu bara yang diolah menjadi pupuk organik, briket, metanol, dan kokas, serta nikel yang diolah menjadi logam antikarat atau baterai. Industri kelapa sawit juga dapat melakukan hilirisasi, misalnya mengubah minyak kelapa sawit mentah menjadi margarin, yoghurt, dan minyak goreng, atau cangkang kelapa sawit menjadi biofuel dan bioplastik (Akhmadi, 2024).

Strategi hilirisasi penting untuk pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, tetapi memerlukan investasi, penelitian, dan kebijakan yang mendukung. Dalam konteks bisnis,

hilirisasi memperluas peluang pasar dan meningkatkan nilai produk, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keuntungan produsen. Hilirisasi memiliki beberapa manfaat ekonomi. Pertama, meningkatkan nilai tambah produk dengan kualitas dan harga jual yang lebih tinggi. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru melalui pengolahan barang mentah. Ketiga, memunculkan produk baru yang bersaing di pasar global, meningkatkan ekspor. Keempat, menstabilkan harga komoditas nasional. Kelima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui keuntungan dari produk yang diekspor (Azahari, 2019).

Di tengah dinamika pasar global, Indonesia terus memperkuat posisinya dalam industri nikel dunia melalui kebijakan hilirisasi yang komprehensif. Pemerintah Indonesia, dipimpin oleh Presiden Jokowi dan koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, secara konsisten membangun ekosistem industri yang mendukung pengolahan dalam negeri. Kebijakan utama meliputi larangan ekspor bijih mentah dan dorongan untuk memproduksi produk turunan bernilai tambah tinggi. Meskipun IMF dan Uni Eropa menyarankan penghapusan kebijakan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen pada strategi hilirisasinya, yakin bahwa langkah ini akan mengoptimalkan nilai tambah (Alkalah, 2016b).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai perkembangan suatu negara. Menurut Solow dalam Lestari, mengatakan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB) riil, yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu (Lestari, 2019). Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output, tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa teori ekonomi, seperti teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer dalam Rahman, menekankan pentingnya inovasi dan akumulasi pengetahuan sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Inovasi teknologi, investasi dalam pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung penelitian dan pengembangan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan (Rahman & , 2015).

Dalam kajian tentang pertumbuhan ekonomi, peran investasi juga sangat signifikan. Menurut Keynes dalam Mauliansyah et al., investasi adalah komponen penting dalam menentukan tingkat permintaan agregat, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Muliansyah & Gede, 2025). Penelitian oleh Barro (1991) menunjukkan bahwa

tingkat investasi yang tinggi berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya yang efisien dan peningkatan kapasitas produksi dapat mempercepat laju pertumbuhan. Selain itu, faktor eksternal seperti perdagangan internasional juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori keuntungan komparatif yang dikemukakan oleh Ricardo dalam Setiawan menjelaskan bahwa spesialisasi dan perdagangan antar negara dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas (Setiawan, 2024).

Selanjutnya, aspek sosial dan politik tidak dapat diabaikan dalam kajian pertumbuhan ekonomi. Institusi yang kuat dan stabilitas politik sering kali menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Acemoglu dan Robinson dalam Chaerani, negara dengan institusi yang inklusif cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan negara yang memiliki institusi eksklusif (Chaerani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mendukung pemerataan kesempatan dan perlindungan hak-hak individu dapat menciptakan iklim investasi yang positif.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Penelitian oleh Stern (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan perhatian terhadap isu lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi semakin relevan dalam diskusi tentang pertumbuhan ekonomi. Integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan perlu diperhatikan agar generasi mendatang dapat menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan moneter, inflasi, dan ketidakpastian politik mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Rachbini (2018) mengungkapkan bahwa stabilitas makroekonomi dan reformasi struktural merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga menjadi prioritas untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan memperlancar arus barang serta jasa (Syekh et al., 2024).

Secara keseluruhan, kajian pustaka mengenai pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomis, sosial, politik, dan lingkungan. Memahami dinamika ini sangat penting untuk merumuskan



kebijakan yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan. Melalui penelitian lebih lanjut di bidang ini, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif untuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan suatu perekonomian, yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau output per kapita. Menurut Boediono, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dari waktu ke waktu, dengan tiga faktor utama yang mempengaruhi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi, sementara pertumbuhan penduduk dapat memperluas angkatan kerja dan kemajuan teknologi meningkatkan efisiensi produksi (Alkalah, 2016a).

Dalam konteks teori pertumbuhan, Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas dan peningkatan faktor produksi. Smith menekankan pentingnya sistem ekonomi liberal yang minim campur tangan pemerintah, sedangkan Ricardo mengingatkan bahwa pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan penurunan upah dan stagnasi ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada peningkatan output tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia dan alam secara efektif (Alkalah, 2016a).

### **Pertumbuhan Ekonomi Dalam perspektif syariah**

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika yang sejalan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, pertumbuhan tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) atau volume barang dan jasa, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Syauqi Beik (2016) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang sehat harus mencerminkan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi syariah, pertumbuhan harus diiringi dengan distribusi yang adil agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Delila Kumalasari, 2024).

Asas-asas pertumbuhan ekonomi dalam Islam terdiri dari beberapa prinsip fundamental, antara lain tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Prinsip tauhid

menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan tidak terlepas dari nilai-nilai spiritual. Hal ini berbeda dengan paradigma kapitalis yang seringkali berfokus pada akumulasi kekayaan tanpa mempertimbangkan aspek moral (Ade Dede, 2000). Selain itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam juga harus memperhatikan aspek distribusi pendapatan yang merata. Menurut Husain (2004), pertumbuhan yang efektif harus dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di golongan pendapatan rendah.

Dalam perspektif syariah, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: sumber daya yang dapat diinvestasikan, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Sumber daya yang dapat diinvestasikan mencakup modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor riil. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan pengembangan industri. Kewirausahaan juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi (Ahmad Syakur, 2011). Oleh karena itu, pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi syariah (Kasim, 2024).

Kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan syariah. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan dukungan terhadap pengembangan sektor riil. Dalam hal ini, perbankan syariah dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengalirkan dana ke sektor-sektor produktif. Tren perbankan syariah menunjukkan bahwa proporsi dana yang disalurkan ke sektor riil semakin meningkat, mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Zainuddin, 2017).

Namun, tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah tetap ada. Praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti riba, monopoli, dan korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut (Dharmayanti & Aziz, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk memastikan bahwa praktik-praktik ekonomi tetap berlandaskan pada etika dan moralitas Islam.

Dalam kajian ini juga penting untuk menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah tidak hanya berfokus pada aspek material tetapi juga pada



kebahagiaan spiritual masyarakat. Konsep kemakmuran dalam Islam mencakup kesejahteraan fisik dan mental serta hubungan sosial yang harmonis (Gunawan, 2020). Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah menawarkan alternatif bagi model pertumbuhan konvensional dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem perekonomian yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Dengan memadukan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek pembangunan ekonomi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Nasution et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pertumbuhan ekonomi tidak hanya difokuskan pada peningkatan output dan pendapatan per kapita, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip masalah dan maqasid syariah. Menurut teori ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek moralitas dan akhlak, serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Konsep pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi syariah menekankan pada beberapa karakteristik, yaitu menyeluruh (*al-Syumul*), seimbang (*Tawazun*), realistis (*Waqi'iyah*), keadilan (*'Adalah*), bertanggung jawab (*Mas'uliyah*), mencukupi (*kifayah*), dan fokus kemanusiaan (*Ghayatuba al-Insan*) (Nasution et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk investible resources, sumber daya manusia (SDM) dan entrepreneurship, serta teknologi dan inovasi. Sumber daya alam harus dioptimalkan dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, sedangkan SDM entrepreneur diperlukan untuk menggerakkan sektor riil yang menjadi basis ekonomi syariah. Teknologi dan inovasi juga berperan penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, kebijakan seperti kewajiban sertifikasi halal, inovasi keuangan sosial syariah, dan digitalisasi eksyar juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Delila Kumalasari, 2024).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik *literature review* untuk menganalisis dampak kebijakan hilirisasi industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam perspektif syariah. Metode ini dipilih karena kemampuannya

untuk menggali dan menganalisis data yang lebih mendalam dan kontekstual, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana kebijakan hilirisasi industri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara syariah. Penelitian ini akan melibatkan analisis literatur yang komprehensif, termasuk studi tentang prinsip-prinsip masalah dan maqasid syariah, serta implementasi kebijakan hilirisasi industri di berbagai sektor industri di Indonesia. Pada penelitian *literature review* diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana kebijakan hilirisasi industri dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sunan & Yogyakarta, n.d.).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilirisasi merupakan proses mengubah bahan mentah menjadi produk siap pakai yang memiliki nilai lebih tinggi. Pada skala nasional, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas negara dengan mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sebelum diekspor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penerapan hilirisasi mencakup berbagai sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Di Indonesia, contoh hilirisasi terlihat pada pengolahan batu bara menjadi berbagai produk seperti pupuk organik, briket, metanol, dan kokas. Selain itu, nikel diolah menjadi logam antikarat dan baterai. Industri kelapa sawit juga menerapkan hilirisasi dengan mengolah minyak sawit mentah menjadi margarin, *yoghurt*, minyak goreng, dan produk lainnya. Bagian cangkang dapat dimanfaatkan untuk *biofuel* dan pakan ternak, sementara tandan buah segar dapat diolah menjadi kompos, rayon, dan kertas pulp.

Meski memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi, implementasi hilirisasi memerlukan proses panjang karena membutuhkan investasi besar, penelitian mendalam, dan dukungan kebijakan pemerintah. Dari sisi bisnis, strategi ini dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai produk. Pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada besarnya investasi, hasil penelitian yang komprehensif, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

Implementasi hilirisasi memberikan beragam dampak positif terhadap perekonomian negara. Dampak utamanya adalah peningkatan nilai tambah komoditas, dimana pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga jual lebih baik, sehingga

meningkatkan daya saing di pasar. Dalam prosesnya, hilirisasi membuka peluang lapangan kerja baru karena membutuhkan tenaga kerja ahli dan terampil untuk mengolah bahan mentah. Strategi ini juga mendorong terciptanya produk-produk inovatif yang mampu bersaing di pasar global, sehingga berpotensi meningkatkan nilai ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, hilirisasi berperan dalam menjaga stabilitas harga dan nilai komoditas nasional, terutama saat terjadi lonjakan harga komoditas impor. Produsen dapat meminimalkan risiko fluktuasi harga bahan mentah dengan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Keuntungan yang diperoleh dari ekspor produk hasil hilirisasi pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Hilirisasi industri di Indonesia menjadi salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing nasional. Proses hilirisasi, yang melibatkan pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir dengan nilai tambah yang lebih tinggi, tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat struktur ekonomi domestik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, dan industri manufaktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilirisasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah. Dengan mengolah sumber daya alam secara lokal, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien. Selain itu, hilirisasi juga mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Penelitian ini menemukan bahwa sektor IKM yang terlibat dalam hilirisasi mengalami peningkatan kapasitas produksi dan akses pasar yang lebih baik. Namun, tantangan dalam implementasi hilirisasi tetap ada, termasuk keterbatasan teknologi, akses pembiayaan, dan kebutuhan akan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung hilirisasi melalui investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta pelatihan bagi para pelaku industri. Dengan pendekatan yang tepat, hilirisasi dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

## **Dampak Hilirisasi Industri Ditinjau Dari Prespektif Syariah**

Program hilirisasi industri khususnya nikel ini menuai banyak kritikan dan berbagai kebijakan kontroversial. Mulai dari vendor asing, buruh asing hingga dampak lingkungan yang membahayakan penduduk sekitar. Menurut lansiran dari Jaringan Advokasi Tambang mendesak pemerintah untuk menghentikan izin usaha dari perusahaan Harita Holding Grup karena mereka terbukti melakukan pencemaran lingkungan mulai dari limbah yang dibuang ke laut lepas hingga intimidasi kepada penduduk sekitar yang menyebabkan produksi mereka terganggu. Solusi pertimbangan standarisasi operasional yang pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah pertimbangan masalah kebutuhan primer atau prioritas. Kebutuhan primer ini mencakup banyak hal, mulai dari kebutuhan sandang, pangan hingga papan karena hal itu menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Melihat masalah hilirisasi ini menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting, sudah tentu itu merupakan ide yang benar. Akan tetapi ketika di daerah proyek tersebut banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencarian sehari-hari seperti berternak, bertani, dan juga mencari ikan di laut. Maka kebutuhan primer mereka sejatinya sudah terpenuhi, tidak perlu lagi melakukan eksploitasi material tambang yang justru merusak ekosistem lingkungan di daerah sekitar. Ini seakan-akan menjadi langkah yang sangat pragmatis dari pemerintah tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang ada di masyarakat.

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi Islam ekonomi dikatakan bertumbuh jika menerapkan maqashid syariah pada berjalannya hilirisasi industri jadi bukan hanya berorientasi pada keuntungan materi tapi juga tetap mempertahankan Keberlanjutan hidup. Terdapat beberapa komponen pendukung, seperti *Hifdzu Addin*, *Hifdzu An-nafs*, *Al-aql*, *An-nasl*, dan *Al-maal*. Maka bisa kita simpulkan menjaga dalam tanda kutip mal justru dijelaskan pada poin terakhir. Karena dalam prespektif islam itu bukan prioritas utama. Substansial pertama adalah bagaimana kita menjaga agama, kepercayaan ataupun kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Karena itu adalah salah satu aset bangsa yang tercipta secara organik di masyarakat. Ketika suatu kebijakan itu merusak tatanan kepercayaan yang ada di sana, maka kebijakan tersebut sudah seharusnya dibatalkan karena merugikan masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah ataupun swasta menggunakan beberapa aspek dari maqahsid syariah ini agar membawa keberkahan untuk alam semesta.

Aspek pertama tentang *Hifdzu Ad-Din* berkaitan dengan aspek penjagaan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam. Oleh karena itu, adanya industri tidak menyebabkan

pengabaian terhadap nilai dan norma agama, baik yang sifatnya kewajiban individu sebagai umat muslim maupun perintah kolektif yang menjadi kewajiban bersama. Kedua adalah *Hifzu An-nafs* Penjagaan terhadap jiwa ini dapat diartikan menjaga Marwah atau kebebasan dalam individu manusia, mereka punya hak yang disebut dengan hak hidup, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat dan masih banyak lagi. Maka penjagaan tersebut harus dijunjung tinggi karena itu merupakan hak setiap individu dan juga menjaga martabat suatu bangsa, ketika masyarakatnya saja dihormati dan dimuliakan, maka secara tidak langsung negara lain akan segan dan hormat kepada bangsa kita. Ketiga adalah *Hifzu Al-aql*, atau menjaga akal. Maksudnya adalah suatu kebijakan itu seharusnya memberikan pencerdasan kepada masyarakat atau moralitas sosial, mulai dari perizinan usahanya, birokrasi, sampai pada keuntungan kepada masyarakat.

Penerapan Maqashid syariah ini dilakukan dalam hilirisasi industri oleh PT Timah, sebagai bagian dari Holding Industri Pertambangan MIND ID, memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah operasionalnya. Pada tahun 2023, perusahaan mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Berikut ini contoh program-program CSR PT Timah mencakup beberapa inisiatif utama dalam penerapan maqashid Syariah yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi (*Hifzu Al-Mal*):
  - a. Program PROTEIN NABATI di Belitung Timur
  - b. Program BUDAYA MENAWAN di Kabupaten Bangka Barat
  - c. Program POS PELAUT di Provinsi Kepulauan Riau
2. Pengelolaan Lingkungan (*Hifzu Al-nafs*):
  - a. Penanaman mangrove
  - b. Program Fishing Ground dan Coral Garden
  - c. Budidaya garam dan dukungan kelompok nelayan
3. Kesehatan Masyarakat (*Hifzu Al-nasl*):
  - a. Program Kemunting untuk pencegahan stunting
  - b. Program Oto Sehat (Mobil Sehat) yang melayani 4.371 warga
4. Pendidikan (*Hifzu Al-aql*):
  - a. Beasiswa Pemali Boarding School
  - b. Dukungan operasional bagi Yayasan YPAC Pangkalpinang

- c. Pemberdayaan masyarakat disabilitas
- 5. Pemberdayaan Masyarakat Adat (*Hifẓ Ad-din*):
  - a. Pembangunan Kampung Adat Gebong Memarong
  - b. Pelatihan keterampilan seperti ecoprint, anyaman, dan pemandu wisata

Kepala Bidang Komunikasi Perusahaan, Anggi Siahaan, menegaskan bahwa program CSR PT Timah didasarkan pada konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan komitmen *Environmental, Social and Governance* (ESG). Tujuannya adalah menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. Upaya ini terbukti berhasil, yang ditandai dengan diraihnya *Indonesia Best CSR Award 2023* dari *The Iconomics* dan LPP Radio Republik Indonesia (RRI).

Hasil penelitian mengenai dampak hilirisasi industri dari perspektif syariah menunjukkan bahwa hilirisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks syariah, hilirisasi tidak hanya dilihat dari segi peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip kehalalan, keadilan, dan keberlanjutan. Proses hilirisasi yang sesuai dengan syariah mendorong industri untuk menghasilkan barang yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid syariah, yang menekankan perlunya menjaga kesejahteraan umat manusia dan lingkungan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hilirisasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk akhir, hilirisasi memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses produksi, sehingga meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka. Selain itu, hilirisasi yang berfokus pada produk halal dapat membuka akses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional, mengingat permintaan global terhadap produk halal terus meningkat.

Namun, tantangan dalam implementasi hilirisasi masih ada. Keterbatasan teknologi dan akses terhadap pembiayaan syariah menjadi hambatan bagi banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk mengatasi kendala ini. Kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur dan penyediaan pelatihan bagi pelaku usaha dapat membantu memaksimalkan potensi hilirisasi. Lebih jauh lagi, dampak



lingkungan dari proses hilirisasi juga menjadi perhatian dalam perspektif syariah. Hilirisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan agar tidak merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, praktik-praktik ramah lingkungan dalam proses produksi perlu diintegrasikan dalam setiap tahap hilirisasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa hilirisasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia jika dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses hilirisasi memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak serta sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Moralitas juga menjadi salah satu aspek krusial dalam peradaban manusia, jangan sampai masyarakat kita hari ini harus menelan pil pahit akibat dari ambisi pemerintah yang terus mengagungkan kaum kapitalis. Keempat adalah *Hifdzu An-nasl* atau menjaga keturunan. Dampak lingkungan menjadi penyebab penting dalam kerusakan secara garis keturunan. Simple nya adalah ketika laut tercemar, maka ikan-ikan yang menjadi asupan utama masyarakat sekitar sudah tidak bisa dikonsumsi lagi karena sudah tercemar oleh limbah mineral yang disebabkan oleh perusahaan tambang tersebut. Padahal kalau kita lihat, kandungan protein dan omega di dalam ikan sangat bagus untuk memberikan stimulus dan rangsangan kepada otak kita yang menyebabkan kualitas SDM kita semakin meningkat. Terakhir adalah masalah profit atau keuntungan. Hal ini berkaitan dengan *Hifdzul Maal*.

Dalam ekonomi masalah keuntungan pasti tidak bisa dilepaskan, karena itu adalah salah satu aspek pendorong untuk melakukan usaha dalam suatu wilayah. Halal Supply Chain harus menjadi rujukan dalam perusahaan mulai dari pencarian bahan baku, proses pengolahan sampai ke jalur distribusi konsumen. Semua tahapan yang dilakukan harus senantiasa memperhatikan aturan yang berlaku serta tidak merusak tatanan ekosistem di lingkungan sekitar. Maka sistesisnya adalah Maqashid Syariah ini dapat digunakan sebagai landasan untuk percepatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## KESIMPULAN

Kebijakan hilirisasi industri memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah produk domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tanpa hilirisasi maka Indonesia akan sulit terlepas dari kebergantungannya kepada Negara lain. Oleh karena itu, sumber daya alam dan kekayaan lainnya harus mampu diolah oleh Indonesia agar menjadi lebih bernilai ekonomis.

Dalam perspektif syariah, kebijakan ini sejalan dengan prinsip produksi islami dimana kita diperintahkan agar mengelola sumber daya dengan optimal agar dapat memberikan keberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil, sesuai bagian-bagian dari tujuan maqashid syariah. Hilirisasi industri memungkinkan peningkatan kemandirian ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan daya saing produk lokal, dan membuka peluang lapangan kerja. Prinsip yang diterapkan dalam kebijakan ini juga mendukung perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijak, sesuai dengan ajaran Islam mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun pelaksanaan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, keterbatasan teknologi, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Dalam perspektif syariah, tantangan ini harus diatasi dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis ilmu pengetahuan, yang mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan maslahat bagi seluruh masyarakat. Jika kebijakan ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, hilirisasi industri dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, F. (2024). Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.18>
- Alkalah, C. (2016a). *Isu Ekonomi Nasional*. 19(5), 1–23.
- Alkalah, C. (2016b). *Pengembangan Mineral Kritis Indonesia, Ekosistem Baterai, Keadaan Listrik dan Industri Terkait Lainnya*. 19(5), 1–23.
- Azahari, D. H. (2019). Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala, dan Prospek. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(2), 81. <https://doi.org/10.21082/fae.v36n2.2018.81-95>
- Chaerani, A. D. (2023). *Analisis Pengaruh Kualitas Institusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Negara-Negara Berpendapatan Rendah, Menengah, dan Tinggi*. Universitas Islam Indonesia.
- Deddy, M. A., & Adriyanto, A. (2023). Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(3), 2026–2032.
- Delila Kumalasari. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam.

- Holistik Analisis Nexus*, 1(7), 162–169. <https://doi.org/10.62504/nexus767>
- Gunawan, M. H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Tabkim XVI No1*, 117–128.
- Hadinata, S., & Marianti, M. M. (2020). Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 99–108. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2287>
- Hehamony, M. D. (2024). Kebijakan Hilirisasi Pertambangan Dalam Hukum Bisnis Nasional. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 335–341.
- Hikam, B. A. A. (2025). HARMONISASI DAN KEPASTIAN HUKUM REGULASI SEBAGAI UPAYA EFEKTIVITAS HILIRISASI MINERAL DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1).
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021). *Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal*.
- Kasim, S. (2024). Paradigma Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 3(1), 25–36. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v3i1.103>
- Lestari, U. S. (2019). *Analisis Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Studi Literatur*. Universitas Andalas.
- Matupalesa, A., Naully, Y. D., & Fanani, I. (2019). Hilirisasi industri sawit di Sumatera Utara. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(1).
- Muliansyah, E., & Gede, I. K. (2025). *Pengantar Ekonomi Makro*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63–71.
- Rahman, T., & J. (2015). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Di Asean. *Media Ekonomi*, 23(3), 199–212. <https://doi.org/10.25105/me.v23i3.3522>
- Riana Prasetya Putri, D., & Faradina, R. (2023). Kajian Kebijakan Hilirisasi Industri Pada Perizinan Kawasan Berikat. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 237–259. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2199>
- SAKTI Agi, A. G. I. (2022). *KONTROVERSI PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DALAM ASPEK YURIDIS*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

- Setiawan, D. (2024). *PANDANGAN EKONOMI DAVID RICARDO*. Setiawan Publisher.
- Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (n.d.). *MANIFESTASI KEBIJAKAN PRODUK DIMETHYL ETHER DALAM SKEMA HILIRISASI BATUBARA SEBAGAI TRANSFORMASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT* Rifka Assyifa Kamala, 1 Zakki Ardli Absani, 2 M. Ihsal Rifaya 3 , Zahra Elisa Siregar 4. 168–184.
- Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Januari-juni, E., Sosial, P., Jurnal, J., Syariah, I. F., Hukum, I., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Volume, P., Januari-juni, E., Syariah, F., & Hukum, I. (2024). *Jurnal El-Qanuniy* -----  
-----, 103–118.